

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

##### **2.1.1. Kompetensi Sumber Daya Manusia**

###### **2.1.1.1. Definisi Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi menurut Abdullah M. Ma'ruf. ( 2014:51) adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Sedangkan menurut Veithzal Rifai Zainal, dkk (2014:232) kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan *perform* yang di terapkan.

Menurut Eddy Soeryanto Soegoto (2014:306) sumber daya manusia adalah individu-individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan menurut Byrd (2011:5) sumber daya manusia adalah aset yang paling penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Karyawan dapat menjadi potensi apabila dikelola dengan baik dan benar, tetapi menjadi beban apabila salah dikelola.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang

mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya (Anwar Prabu Mangkunegara, 2012:40).

Dari definisi-definisi menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang cukup memadai untuk mencapai tujuan organisasi.

#### **2.1.1.2.Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Wibowo (2014:273) menjelaskan kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki:

1. **Motif**  
Sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu.
2. **Sifat**  
Karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri fisik kompetensi seorang pilot tempur.
3. **Konsep diri**  
Sikap, nilai-nilai atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang.
4. **Pengetahuan**  
Informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik.
5. **Keterampilan**  
Kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual.

Sedangkan Moeheriono (2014:14) mengemukakan mengenai karakteristik kompetensi sumber daya manusia yaitu:

1. Watak (*traits*)  
yaitu yang membuat seseorang mempunyai sikap perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespon sesuatu dengan cara tertentu, misalnya percaya diri (*self-confidence*), kontrol diri (*self-control*), ketabahan atau daya tahan (*hardiness*).
2. Motif (*motive*)  
Sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara konsisten dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan suatu tindakan.
3. Bawaan (*self-concept*)  
Sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.
4. Pengetahuan (*knowledge*)  
Informasi yang dimiliki seseorang pada bidang tertentu dan pada area tertentu.
5. Keterampilan atau keahlian (*skill*),  
Kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental.

Berdasarkan pemikiran, penelitian ini menggunakan indikator untuk Kompetensi Sumber Daya Manusia yaitu motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan (Wibowo, 2014:273)

## **2.1.2. Pengawasan Keuangan Daerah**

### **2.1.2.1. Definisi Pengawasan Keuangan Daerah**

Pengawasan adalah suatu proses untuk mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya sesuai dengan rencana perintah, dan tujuan kebijaksanaan yang telah ditetapkan (Dedi Ismatullah, 2012:96).

Menurut T. Hani Handoko (2014:358) Pengawasan adalah sebagai berikut:

“Suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil

tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintah.”

Menurut Angger Sigit Pramukti (2016:15) pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai.

Menurut Hendra Karinaga (2017:54) mengemukakan bahwa keuangan daerah adalah:

“Sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Atau segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki dan atau dikusai daerah atau negara yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.”

Menurut Halim dan Iqbal (2012:37) definisi pengawasan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Pengawasan keuangan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.”

Berdasarkan referensi dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah adalah suatu kegiatan atau proses pemantauan hasil dari kinerja pemerintahan daerah dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah untuk menjamin perencanaan yang telah disusun sudah berjalan dengan efektif, efisien, dan ekonomis.

### 2.1.2.2.Indikator Pengawasan Keuangan Daerah

Dari beberapa teori yang dijabarkan di atas mengenai definisi pengawasan, penulis menggunakan dimensi sebagai bahan acuan untuk mengisi data operasional variabel dari T Hani Handoko (2014:359) yang meliputi dimensi dan indikator sebagai berikut :

1. Prosedur  
Pimpinan selalu melihat pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai.
2. Standar  
Adanya batasan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.
3. Ketelitian  
Adanya pengukuran kerja pegawai.
4. Pengukuran Pekerjaan  
Adanya evaluasi pekerjaan pegawai.
5. Perbaikan  
Adanya koreksi pekerjaan dari pimpinan atau atasan.

Silalahi (2011 : 178) mengemukakan prinsip – prinsip pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan atas pekerjaan.
2. Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan secara objektif.
3. Pengawasan bukan semata – mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan – pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
5. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan definisi (hasil guna).
6. Pengawasan harus fleksibel.
7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (*plan and objective oriented*).
8. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat – tempat strategis atau kegiatan – kegiatan yang sangat menentukan atau control by exception.
9. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*).

Berdasarkan pemikiran diatas, penelitian ini menggunakan indikator untuk Pengawasan Keuangan Daerah yaitu prosedur, standar, ketelitian, pengukuran pekerjaan dan perbaikan (T Hani Handoko, 2013:359).

### **2.1.3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **2.1.3.1. Definisi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Iman Mulyana (2010:96) kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.

Erlina, Rasdianto (2013:21) dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI mengemukakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah

“Suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.”

Baldric Siregar (2015:12) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Erlina Rasdianto (2015:25) mendefinisikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran orang yang menilai atau merinci dari suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.”

Dari definisi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kualitas laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

### **2.1.3.2.Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Erlina Rasdianto (2015:30) mengemukakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

1. Relevan.
  - a. Memiliki manfaat umpan balik(*feedback value*).  
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
  - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).  
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
  - c. Tepat waktu.  
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
  - d. Lengkap.  
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.
2. Andal
  - a. Penyajian jujur.  
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
  - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*).

Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas.

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Marja Sinurat (2014:119) mengemukakan karakteristik yang merupakan persyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Berdasarkan pemikiran diatas, penelitian ini menggunakan indikator untuk Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu relevan, andal dan dapat dipahami (Mahmudi, 2016:11 dan Sinurat, 2014:119).

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Abdul Hafidz Tanjung. (2014:76) pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan daerah adalah salah satu hal yang mendasar LKPD tidak mendapatkan opini WTP dari BPK RI dikarenakan langkanya sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Bastian (2006:55) berpendapat bahwa pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu;

“Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. SDM menjadi faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang menguasai SAP. Betapapun begusnya SAP, tanpa didukung SDM sangat membantu proses kebijakan-kebijakan akuntansi tersebut agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akuntansi tersebut agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terbaru yaitu berbasis akrual.”

Sedangkan Menurut Wahyono (2004:12) pengaruh kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut;

“Dalam menghasilkan suatu nilai yang bernilai (keterandalan) disini menyangkut dua elemen pokok yaitu, informasi yang dihasilkan dan sumber daya menghasilkannya, menyangkut informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Kemudian menyangkut sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem atau yang menghasilkan informasi tersebut, sehingga dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya dibidang akuntansi. Disini kemampuan sumber

daya manusia itu sendiri dapat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan).”

Dalam penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah oleh Synthia, S. (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.”*The results indicate that the competence of human resources, financial accounting system application have a significant positive effect on the quality of the financial statements.*”

Selain itu menurut Putriasri Pujanira, dan Abdullah Taman (2017) dari hasil penelitian diperoleh bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan t hitung = 8,049 dan = 0388.

### **2.2.2. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Arens dalam Fadilah Amin (2019:161) menyebutkan dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi di dalam entitas akuntansi, maka akan tercipta laporan keuangan yang berkualitas.

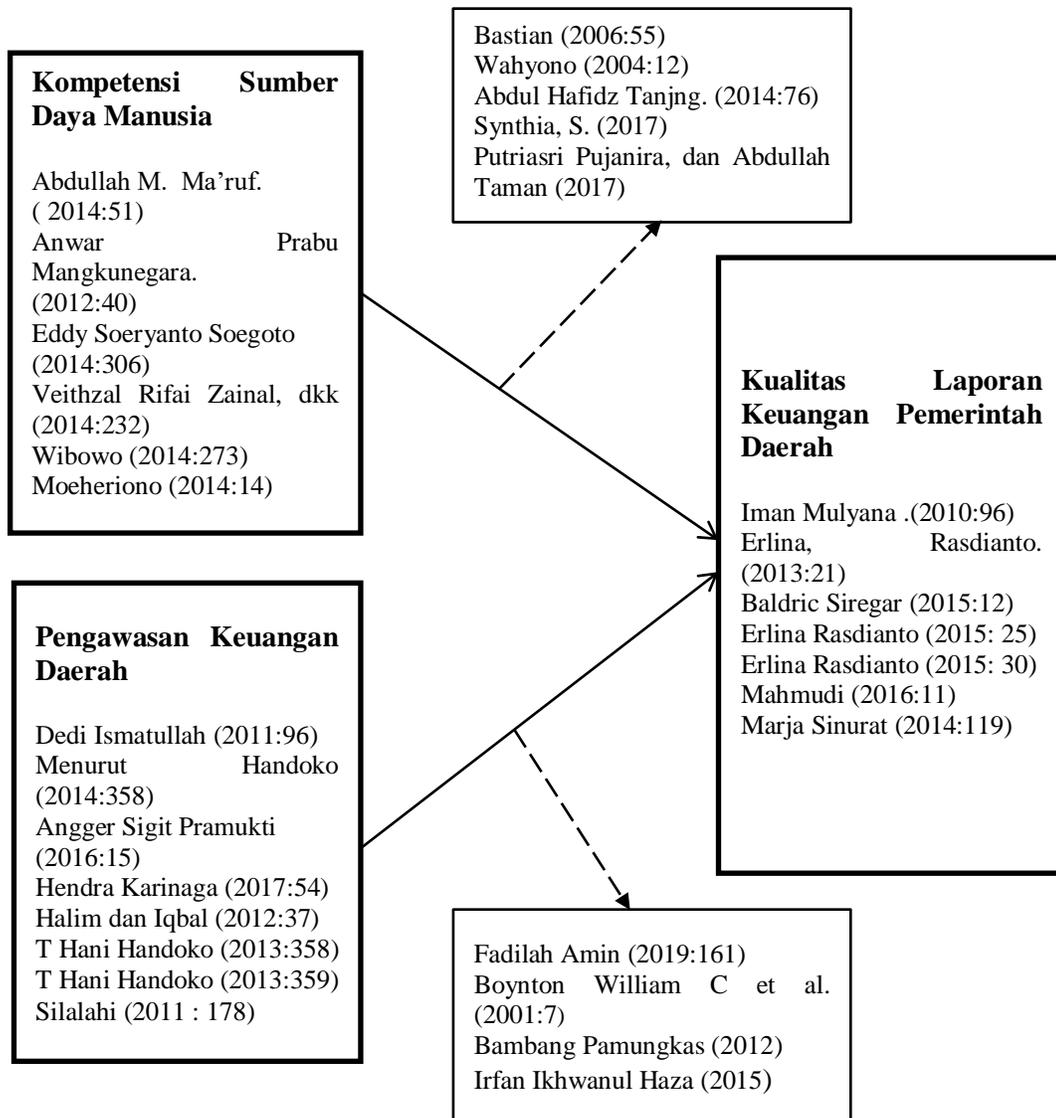
Boynton William C *et al.* (2001:7) berpendapat dalam buku *Modern Auditing* mengenai pengaruh antara Pengawasan keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dimensi pengawasan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah, meliputi :

- 1) Standar hasil yang diinginkan
- 2) Laporan
- 3) Audit, dan
- 4) Anggaran didominasi dengan jawaban positif.

Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan akan tidak bermanfaat dan pengawasan keuangan yang menyandarkan kepada penerapan standar akuntansi keuangan akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Dalam penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah oleh Bambang Pamungkas (2012) dengan hasil penelitian pengaruh langsung pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah berdasarkan hasil uji statistik adalah sebesar 0,175 dengan sig t kurang dari 0,5% hal ini menunjukkan bahwa penerapan pengawasan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah. Selain itu menurut Irfan Ikhwanul Haza (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### 2.2.3. Paradigma Pemikiran



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Pemikiran**

### 2.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Sedangkan hipotesis menurut Umi Narimawati (2010:7) adalah asumsi atau dugaan dengan sementara yang harus diuji kebenarannya dalam suatu analisis statistik. Untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H<sub>2</sub> : Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.